BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Hal ini dikarenakan pajak merupakan sumber pendapatan utama negara. Pentingnya peranan pajak bagi negara menyebabkan pemerintah menciptakan berbagai program dan regulasi yang ditujukan untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Adapun usaha yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak adalah memberikan insentif penurunan tarif pajak badan melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat (2b) dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang penyederhanaan perhitungan pajak. Namun dalam kenyataannya, program dan regulasi yang diciptakan oleh pemerintah ini banyak disalahgunakan. Hal ini mendorong perusahaan melakukan tindakan untuk meminimalisir beban pajaknya legal maupun ilegal dengan cara melakukan agresivitas pajak.

Tindakan yang dilaksanakan untuk menurunkan beban pajak dikenal dengan istilah penghindaran pajak (*tax avoidance*) atau pada studi lain disebut agresivitas pajak (*tax aggressiveness*) (Lanis dan Richardson, 2012). Mengurangi beban pajak dengan tetap memperhatikan kebijakan perpajakan menjadi tujuan diterapkannya agresivitas pajak. Mekanisme yang dipakai dalam agresivitas pajak ialah dengan memanfaatkan kelemahan (*grey area*) pada kebijakan perpajakan yang ada dan bersifat legal. Agresivitas pajak adalah strategi yang digunakan

manajemen perusahaan, serangkaian proses, praktek, sumber daya dan pilihan yang memiliki tujuan untuk memaksimalkan pendapatan setelah semua entitas perusahaan serta kewajiban terutang kepada negara dan pemangku kepentingan lainnya. Implementasi strategi semacam ini diarahkan untuk mengurangi basis pajak yang memungkinkan timbulnya biaya non pajak yang berpotensi tinggi dari konflik agensi atau otoritas pajak seperti penalti dan *rent extraction*. Tujuan perusahaan melakukan agresivitas pajak yaitu meningkatkan laba bersih perusahaan agar menciptakan pandangan positif bagi investor asing (Innocent & Gloria, 2018)

Agresivitas pajak dapat dilakukan melalui tindakan perencanaan pajak baik secara legal (*tax avoidance*) maupun ilegal (*tax evasion*) yaitu usaha untuk mengurangi hutang pajak (Diatmika & Sukartha, 2019). *Tax avoidance* adalah suatu bentuk perencanaan pajak untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan ketentuan perpajakan sebagai hal yang positif untuk efisiensi pembayaran pajak. Untuk memperkecil terjadinya *tax avoidance* pada perusahaan dalam negeri maka dari itu pemerintah mendirikan komite audit yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan tata kelola perusahaan. Menurut Wiagustini, (2010) pembentukan komite audit bertujuan membantu dewan komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan atas kinerja perusahaan dalam pelaporan keuangan dan melakukan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimbangan dalam pengelolaan perusahaan dan komite audit dalam perusahaan diharapkan lebih efektif memberikan suatu mekanisme pengawasan perusahaan yang lebih efektif dan baik, sehingga dapat mengurangi

biaya agensi dan kualitas pelaporan keuangan perusahaan yang baik. Menurut (Hanlon & Heitzman, 2010) agresivitas pajak adalah strategi penghindaran pajak untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak perusahaan dengan menggunakan ketentuan yang diperbolehkan maupun memanfaatkan kelemahan hukum dalam peraturan perpajakan atau melanggar ketentuan dengan menggunakan celah yang ada namun masih di dalam *grey area*. Kurang spesifiknya peraturan perpajakan yang ada membuat banyak pihak memanfaatkan celah dari peraturan tersebut, sehingga menjadikan agresivitas pajak sebagai tindakan yang tidak melanggar aturan namun dapat merugikan negara. Tindakan agresivitas pajak merupakan hal yang beresiko terhadap reputasi perusahaan dan terdapat kemungkinan untuk dijatuhi denda di masa depan (Yuwono & Fuad, 2019).

Pemerintah banyak dirugikan karena beberapa kasus agresivitas pajak yang terjadi seperti penghindaran pajak. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengalami dugaan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan perusahaan batu bara PT Adaro Energy Tbk dengan skema *transfer pricing* melalui anak perusahaan yang berada di Singapura. Dalam laporan itu, Adaro diindikasikan melarikan pendapatan dan labanya ke luar negeri sehingga dapat menekan pajak yang dibayarkan kepada Pemerintah Indonesia. Menurut Global Witness, cara ini dilakukan dengan menjual batu bara dengan harga murah ke anak perusahaan Adaro di Singapura, Coaltrade Services International untuk dijual lagi dengan harga tinggi. Melalui perusahaan itu, Global Witness menemukan potensi pembayaran pajak yang lebih rendah dari seharusnya dengan

nilai 125 juta dolar AS kepada pemerintah Indonesia. Di samping itu, Global Witness juga menunjuk peran negara suaka pajak yang memungkinkan Adaro mengurangi tagihan pajaknya senilai 14 juta dolar AS per tahun.

Kasus lain, PT Kaltim Prima Coal melakukan praktik *transfer pricing* dengan menjual batu bara dengan harga miring, dibawah harga yang berlaku di pasar ke perusahaan terafiliasi (PT Indocoal Resource Limited). Penjualan batu bara hanya dihargai separuh dari harga yang biasa dilakukan KPC menjual langsung kepada pembeli. Berikutnya penjualan kepada pembeli lainnya pun dilakukan oleh Indocoal dengan memakai harga jual KPC biasanya. Akibatnya, omset penjualan KPC jauh lebih rendah sehingga negara dirugikan sebesar Rp 1,7 triliun.

Dari kasus di atas dapat dilihat bahwa agresivitas pajak baik itu yang bersifat legal maupun ilegal banyak terjadi bahkan di berbagai sektor perusahaan. Perusahaan mencoba banyak cara untuk bisa meminimalkan jumlah pajak yang akan dibayarkan. Pada fenomena diatas dapat dilihat penghindaran pajak merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam meminimalkan beban pajak. Tindakan perusahaan dalam meminimalkan pajak dapat mengakibatkan jumlah pajak yang akan dilaporkan perusahaan kepada negara menjadi lebih kecil dari yang seharusnya. Hal ini akan mempengaruhi jumlah pemasukan pajak dan menimbulkan kerugian untuk negara.

Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi sebuah perusahaan melakukan agresivitas pajak diantaranya yaitu *capital intensity* dan *inventory*

intensity. *Capital intensity* yaitu aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan investasi dalam bentuk aset tetap (Novitasari, 2017). Gemilang (2017) mengatakan bahwa aset tetap perusahaan akan menyebabkan timbulnya beban penyusutan yang nantinya secara otomatis akan mengurangi laba perusahaan karena adanya beban penyusutan yang akan mengurangi beban pajak perusahaan. *Capital intensity* berhubungan dengan agresivitas pajak karena perusahaan yang memiliki jumlah aset yang besar akan mempunyai beban pajak yang lebih rendah. Hal ini disebabkan adanya beban penyusutan yang timbul atas kepemilikan aset tetap tersebut yang akan mengurangi beban pajak perusahaan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Efrinal & Chandra (2020) dan Isnanto & dkk (2019) yang membuktikan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. *Capital intensity* berhubungan dengan agresivitas pajak karena perusahaan yang memiliki jumlah aset tetap yang besar akan mempunyai beban pajak yang lebih rendah.

Faktor kedua yang mempengaruhi agresivitas pajak adalah *inventory intensity*. *Inventory intensity* merupakan suatu pengukuran besarnya persediaan yang diinvestasikan oleh perusahaan (Latifah, 2018). Perusahaan dengan investasi persediaan digudang akan menyebabkan terbentuknya biaya penyimpanan dan biaya pemeliharaan persediaan, beban ini akan menyebabkan berkurangnya laba perusahaan yang nantinya akan mengurangi beban pajak yang seharusnya dibayar perusahaan sehingga perusahaan akan lebih agresif (Latifah, 2018). Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Yuliana & Wahyudi

(2018) dan Arizoni, Ratnawati, & Andreas (2020) yang membuktikan bahwa *inventory intensity* berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak.

Selain faktor diatas profitabilitas dan *leverage* juga dapat mempengaruhi agresivitas pajak. Menurut (Rodriguez & Ariaz, 2012) profitabilitas merupakan faktor penentu beban pajak, karena perusahaan dengan laba yang lebih besar akan membayar pajak yang lebih besar pula. Sebaliknya, perusahaan dengan tingkat laba yang rendah maka akan membayar pajak yang lebih rendah atau bahkan tidak membayar pajak jika mengalami kerugian. Besarnya pajak yang dibayarkan tergantung dari laba yang dihasilkan, karena laba merupakan dasar pengenaan pajak perusahaan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Winarsih, Amah, & Sudrajat (2019) dan Yauris & Agoes (2019) yang membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Selain variabel diatas *leverage* juga merupakan yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak. (Gemilang, 2017) *leverage* merupakan jumlah utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk pembiayaan dan bisa digunakan untuk mengukur besarnya aktiva yang dibiayai oleh utang. Perusahaan dengan *leverage* tinggi maka tingkat agresivitas perusahaan akan tinggi (Gemilang, 2017). Sumber dana pinjaman yang tinggi akan membuat beban bunga yang ditanggung perusahaan menjadi tinggi. Beban bunga akan mengurangi laba perusahaan, sehingga dengan berkurangnya jumlah laba maka akan mengurangi beban pajak yang ditanggung perusahaan. Perusahaan dapat menggunakan tingkat *leverage* sebagai alat untuk mengurangi beban pajak. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan

(Windaswari & Merkusiwati, 2018) dan Nugraheni & Murtin (2019) yang membuktikan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Penelitian ini dilakukan untuk mencari informasi terkait dengan ketaatan perusahaan dalam membayar pajak atau perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak. Penelitian ini menggunakan proksi effective tax rate (ETR) sebagai pengukuran agresivitas pajak perusahaan. ETR dianggap mampu merefleksikan perbedaan antara perhitungan laba buku dengan laba fiskal (Putri, 2013)

Berdasarkan latar belakang dan adanya perbedaan hasil penelitian oleh peneliti-peneliti sebelumnya, maka peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai “pengaruh *capital Intensity*, *inventoryi intensity*, profitabilitas dan *leverage* terhadap agresivitas pajak”. Penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan dengan peneliti terdahulu yakni dari objek penelitian yang digunakan pemilihan perusahaan pertambangan yang mana sifat dan karakteristik industrinya berbeda dengan industri lainnya. Sektor pertambangan merupakan salah satu penopang pembangunan ekonomi suatu negara, karena perannya sebagai penyedia sumber daya energi yang sangat diperlukan bagi pertumbuhan perekonomian suatu negara. Potensi yang kaya akan sumber alam akan dapat menumbuhkan terbukanya perusahaan-perusahaan untuk melakukan eksploitasi pertambangan sumber daya tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah *inventory intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
4. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *inventory intensity* terhadap agresivitas pajak
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharap mampu memberikan kontribusi ilmiah bagi berbagai pihak. Dan secara global akan memberikan kontribusi kepada :

a. Bagi peneliti

Penelitian ini merupakan bentuk aplikasi keilmuan peneliti yang diperoleh selama perkuliahan. Hal ini diharapkan dapat memperluas wawasan, menghadapi dan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi.

b. Bagi pihak lainnya.

a) Bagi pihak-pihak lain yang turut membaca penelitian ini agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan sesuai dengan topik penulisan dan sebagai sumbangan pemikiran tentang pengetahuan dibidang Akuntansi Perpajakan khususnya yang membahas tentang *agresivitas pajak*

b) Sebagai masukan untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dimasa mendatang serta sebagai bahan rujukan (tambahan referensi) khususnya dalam bidang perpajakan.

1.5 Sistematika Peulisan

Sistematika penulisan ini dibuat untuk memberikan keterangan secara garis besar mengenai struktur penulisan yang dibagi menjadi lima bab. Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Puskata dan Pengembangan Hipotesis

Bab ini menguraikan tentang berbagai teori yang menjadi dasar penelitian dalam penulisan, konsep yang terkait dengan variabel penelitian, berbagai penelitian sebelumnya, hipotesis penelitian dan kerangka pemikiran.

BAB III : Metodologi Penelitian

Bab ini membahas mengenai variabel penelitian yang digunakan, definisi masing–masing variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan.

BAB IV : Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini membahas mengenai deskripsi objek penelitian, pembahasan hasil analisis, dan interpretasi data hasil penelitian.

BAB V : Penutup

Bab ini adalah bab terakhir dalam penulisan skripsi dan berisi kesimpulan hasil analisis, keterbatasan penelitian, dan saran bagi penelitian selanjutnya.